

## **Analisis Faktor Yang Mempengaruhi Kemiskinan Tahun 2016-2021: Studi Kasus di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta**

Imam Ma'ruf Azhari<sup>1)</sup>  
[b300190231@student.ums.ac.id](mailto:b300190231@student.ums.ac.id)

Sitti Retno Faridatussalam<sup>2)</sup>  
[srf122@ums.ac.id](mailto:srf122@ums.ac.id)

<sup>1)2)</sup> Universitas Muhammadiyah Surakarta

### **ABSTRAK**

Kemiskinan adalah suatu kondisi utama yang mana sebagai sasaran fokus perhatian pemerintah di Indonesia salah satunya kemiskinan yang terdapat di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Dampak dari kemiskinan adalah Indonesia yang masih tergolong negara berkembang sehingga dapat mengakibatkan terhambatnya pembangunan di Indonesia. Dalam penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan mengetahui pengaruh indeks pembangunan manusia, upah minimum, produk domestik bruto, dan jumlah objek pariwisata terhadap kemiskinan di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta selama periode 2016-2021. Data yang dikumpulkan dengan Teknik dokumentasi yang bersumber dari website Badan Pusat Statistik Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dan dianalisa menggunakan regresi data panel. Berdasarkan hasil uji Chow dan Uji Hausman model yang terpilih dalam penelitian ini adalah *Fixed Effect Model* (FEM). Berdasarkan penelitian mengatakan bahwa indeks pembangunan manusia dan upah minimum Kabupaten/kota berpengaruh signifikan terhadap kemiskinan sedangkan produk domestik bruto dan jumlah objek wisata tidak berpengaruh terhadap kemiskinan di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

**Kata kunci:** Kemiskinan, Indeks Pembangunan Manusia, Upah Minimum, Produk Domestik Bruto, Jumlah Objek Pariwisata.

## PENDAHULUAN

Indonesia merupakan sebuah negara berkembang dimana mempunyai golongan penduduk yang banyak ke 4 dalam berbagai dunia sebesar 276,4 juta jiwa, akibat dari banyaknya penduduk sehingga belum tercapainya pemerataan pembangunan infrastruktur perekonomian maka muncul masalah ketimpangan sosial seperti kemiskinan, pengangguran dan kriminalitas dimasyarakat (Nurcholis, 2014).

Kemiskinan sebagai suatu masalah yang kompleks yang mana dalam melakukan pembangunan perekonomiannya terdapat suatu masalah dalam wilayahnya. Sampai saat ini masalah kemiskinan masih menjadi perbincangan baik ditingkat nasional maupun internasional (Azizah, 2018), kemiskinan merupakan sebuah kondisi di mana ketidakmampuan seseorang ataupun kelompok orang dalam mencukupi kebutuhan-kebutuhan hidupnya diantaranya pakaian, makanan, pendidikan, kesehatan maupun tempat untuk bertinggal hidup.

Badan Pusat Statistik (BPS) Indonesia mengartikan kemiskinan sebagai kekurangan kondisi hidup yang dihadapi oleh individu tau rumah tangga yang tidak mampu dalam memenuhi kebutuhan dasarnya. Salah satu indicator seberapa baik ataupun buruknya perekonomian di suatu negara adalah tingkat kemiskinan.

Dalam saat ini terdapat 26,16 juta orang yang berada dalam kehidupan kemiskinan salah satunya di negara Indonesia, ada beberapa factor keadaan yang diakiabatkannya diantaranya yaitu belum terjadinya pemerataan penghasilan di masyarakat, tingkat upah yang masih rendah dan indek pembangunan manusia yang masih rendah. Apabila kecenderungan untuk melakukan kegiatan manufaktur juga akan rendah jika kualitas sumber daya manusianya rendah, yang pada akhirnya akan berdampak atau berpengaruh pada upah minimum (Kuncoro, 2008).

Dalam kualitasnya indek pembangunan sumberdaya manusia akan berdampak pada beberapa aspek antara lain kesehatan, Pendidikannya, dan kondisi lingkungan persosialan, hal ini dapat menjadi isu keseriusan pemerintah pusat dan juga daerah akan pentingnya masalah jumlah penduduk miskin yang harus segera ditangani secara komperhensif.

Demi mewujudkan pembangunan ekonomi yang berkemajuan, potensi ekonomi di suatu wilayah kabupaten/kota harus digali maupun melakukan pemanfaatan secara berdaya guna. Terdapat suatu indikator terpenting demi keberhasilan pembangunan ekonomi yaitu dengan PDRB yang tinggi, karena dapat diharapkan untuk mengubah suatu daerah menjadi lebih baik secara positif mempengaruhi kemiskinan. Namun, dengan PDRB yang tinggi tidak menjamin kesejahteraan penduduk suatu wilayah (Kusumaningsih et al., 2022).

Dari berbagai provinsi terutama di Pulau Jawa, Provinsi Yogyakarta terdapat presentase penduduk miskin yang sangat tinggi, pada tahun 2016 – 2021 persentase penduduk miskin di Provinsi Yogyakarta mengalami hasil yang turun signifikan, meski cenderung mengalami penurunan akan tetapi persentasenya masih diatas 10%, sebesar 506.450 ribu jiwa. Hal ini disebabkan oleh rendahnya tingkat pendapatan masyarakat, kualitas pendidikan dan kesehatan yang masih kurang dan upah minimum yang masih rendah, Oleh sebab itu untuk mengurangi jumlah penduduk miskin di Provinsi Yogyakarta perlu dilakukan langkah analisis lebih lanjut guna mengumpulkan informasi yang jelas sehingga dapat dijadikan acuan dalam merumuskan sebuah kebijakan dalam upaya mengatasi masalah kemiskinan di Provinsi Yogyakarta.

**Tabel 1:Kemiskinan Berdasarkan Provinsi Di Pulau Jawa Tahun 2016-2021 ( Persen )**

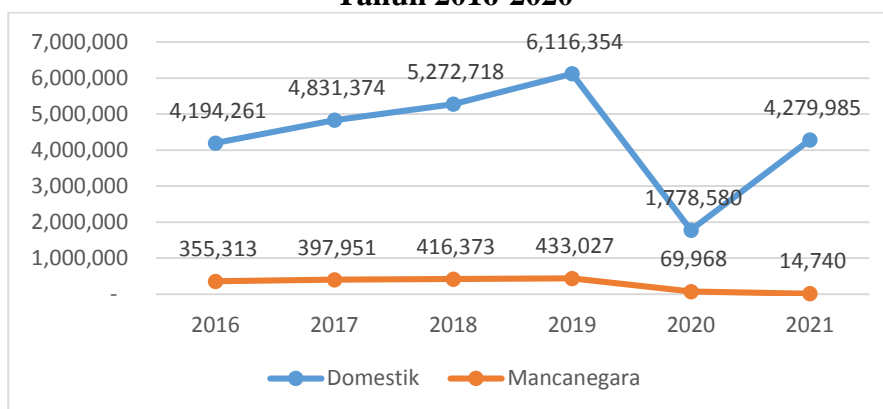
Nama Wilayah	Jumlah Penduduk Miskin Kabupaten/Kota (Persen)					
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Dki Jakarta	3.75	3.77	3.57	3.47	4.53	4.72
Jawa Barat	8.95	8.71	7.45	6.91	7.88	8.4
Jawa Tengah	13.27	13.01	11.32	10.8	11.41	11.79
Yogyakarta	13.34	13.02	12.13	11.7	12.28	12.8

Jawa Timur	12.05	11.77	10.98	10.37	11.09	11.4
------------	-------	-------	-------	-------	-------	------

Sumber : Badan Pusat Statistik, 2022

Dalam rangka mendorong atau menopang pertumbuhan ekonomi di Provinsi Yogyakarta dalam mencapai tujuan untuk mengatasi kemiskinan, sektor pariwisata memiliki peranan penting penggerak roda perekonomian, dikarenakan sektor pariwisata memiliki efek berganda (*multiplier effect*). Kegiatan pariwisata dapat menjalankan ataupun menggerakkan sektor-sektor perekonomian lainnya seperti industri kerajinan, restoran, akomodasi dan jasa transportasi, penginapan atau perhotelan dan berbagai sektor perekonomian lainnya, yang memungkinkan perekonomian mengalami peningkatan sehingga dapat menjamin ketersediaan lapangan pekerjaan, dan meningkatkan penghasilan bagi masyarakat sekitar sehingga dapat mengurangi kemiskinan di berbagai daerah Provinsi Yogyakarta.

**Gambar 1: Perkembangan Wisatawan ke Daerah Istimewa Yogyakarta (Domestik dan Mancanegara) Tahun 2016-2020**



Sumber : Statistik pariwisata Dinas Pariwisata 2021

Pada gambar 1 perkembangan perekonomian khususnya disektor pariwisata mengalami perkembangan yang cukup signifikan dari tahun 2016 – 2019 sebesar 6,116,354 jiwa , namun pada tahun 2020 mengalami hasil penurunan yang buruk sebesar 1.178.580 jiwa, yang disebabkan oleh pandemi Covid 19 sehingga mengakibatkan menurunnya jumlah kunjungan wisatawan asing maupun domestik, akan tetapi sektor pariwisata kembali mengalami kenaikan di tahun 2021 sebesar 4.279.985. hal ini membuktikan bahwa pariwisata di Provinsi Yogyakarta memiliki daya tarik yang cukup tinggi baik wisatawan domestik maupun mancanegara, ini dapat dijadikan sebagai pedoman dalam mengembangkan potensi sektor pariwisata agar lebih baik dan berkembang serta dapat mengangkat pertumbuhan ekonomi setempat sehingga bisa mengurangi masalah kemiskinan. Namun demikian, diperolehnya SDA yang melimpah di provinsi Yogyakarta dapat menjadi potensi pendapatan suatu daerah. Jadi hal ini dapat sebagai permulaan yang positif dalam memulihkan perekonomian di Provinsi Yogyakarta (Rahmawati et al., 2022).

Berdasarkan uraian di atas, maka penelitian ini dibuat bertujuan untuk menganalisis maupun mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi kemiskinan di Provinsi Yogyakarta di tahun 2016-2021. Meningkatnya kemiskinan di Provinsi Yogyakarta sudah menjadi kewajiban bagi pemerintah dalam penanggulangan kemiskinan, karena sebagai penunjang proses taraf hidup masyarakat masalah kemiskinan menjadi tugas Bersama. Selain itu, pentingnya memahami variabel-variabel yang berkontribusi terhadap kemiskinan di Yogyakarta.

## **TINJAUAN PUSTAKA**

### **Kemiskinan**

Menurut Mankiw, kemiskinan sebagai kondisi ekonomi yang berpengaruh terhadap beberapa orang dalam sebuah populasi, namun hanya ukuran efeknya tidak sama dalam setiap populasi (Ramadhani, 2021). Kemiskinan juga dapat dikatakan sebagai tidak mempunyai pekerjaan sehingga mereka takut untuk masa depannya dan tidak mempunyai akses kehidupan terhadap sumber air yang bersih (Safri, 2021). Faktor penyebab terjadinya kemiskinan adalah rendahnya pendapatan penduduk kurangnya lapangan kerja, proses pertumbuhan ekonomi yang menurun, pendapatan rendah, fasilitas-fasilitas pelayanannya kesehatan maupun pendidikan yang berkurang (Fadila & Marwan, 2020). Kesempatan kerja yang berkurang memberikan dampak seseorang menjadi miskin diakibatkan untuk mendapatkan penghasilan semakin menurun. Kebijakan pembangunan maupun berbagai program penanggulangan kemiskinan yang dibangun pemerintah tidak memperhatikan karakteristik maupun konteks masyarakat yang miskin di daerahnya sehingga memberikan angka kemiskinan di berbagai daerah meningkat (Fitriana & Hasmarini, 2022).

### **Produk Domestik Regional Bruto**

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) adalah jumlah nilai tambah diperoleh hasil dari beberapa unit usaha di wilayah yang dituju, ataupun jumlah nilai barang maupun jasa akhir diperoleh dari hasil seluruh unit perekonomian di berbagai wilayah yang dituju (Astuti, 2018). PDRB menjelaskan kemampuan suatu daerah dalam pengelolaan SDA yang diperolehnya. Besaran dalam PDRB yang diperoleh hasilnya di suatu wilayah memiliki ketergantungan dengan faktor produksi wilayah tersebut. Tujuan perhitungan PDRB yaitu untuk membantu pemerintah menetapkan kebijakan maupun perencanaan daerah, selain itu memberikan informasi yang menjelaskan kinerja perekonomian daerah (Nabawi, 2020). Untuk mengetahui keberhasilan masyarakat yang makmu dalam pembangunan daerah dapat dengan meningkatkan PDRB yang berpengaruh dapat menurunkan angka kemiskinan. PDRB sebagai indikator gejala pertumbuhan ekonomi, yang mana dapat menggambarkan aktivitas perekonomian yang telah dicapai pada satu periode (Iqraam & Sudibia, 2019).

### **Upah Minimum**

Upah minimum merupakan suatu upah yang biasanya dipergunakan oleh pengusaha ataupun orang yang melakukan kegiatan perindustrian agar mendapatkan upah/gaji kepada orang yang bekerja di lingkungan perusahaannya maupun pekerjaan (Wardhana et al., 2022). Kebijakan upah minimum digunakan untuk menaikkan derajat atau kualitas penduduk yang tidak dapat mencukupi kebutuhan hidupnya diakibatkan kurangnya pendapatan mereka (Islami & Anis, 2019). Upah dapat dijelaskan sebagai jumlah uang yang telah diterima oleh para tenaga kerja yang mana dalam pembayaran atas tenaga kerja mereka yang dilakukan saat bekerja (Sutikno et al., 2019). Upah minimum regional mempengaruhi tingkat kemiskinan. Upah minimum yang mempengaruhi kemiskinan dikarenakan biaya sosial dari inflasi yang memberikan orang-orang sekitar berdampak menjadi miskin (Oktaviani & A'yun, 2021).

### **Indeks Pembangunan Manusia**

Indeks Pembangunan manusia sebagai indikator mengukur pencapaian pembangunan berdasarkan meningkatkan dasar kualitas hidup (Silaban et al., 2021). Indeks pembangunan memiliki tiga dimensi dasar yang meliputi umur panjang, kesehatan, ataupun pengetahuan maupun hidup yang berlayak. Dalam pengukuran kesehatan, pendidikan, maupun hidup yang layak dalam pembangunan masyarakat diperlukan adanya meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan menggunakan alat pengukuran yaitu atau biasanya disebut dengan Indeks Pembangunan Manusia (Safri, 2021). Indeks Pembangunan Manusia merupakan salah satu parameter pencapaian peningkatan pembangunan di suatu daerah yang berkorelasi negative dengan kemiskinan. Semakin tinggi angka IPM menandakan

bahwa kualitas hidup manusia menjadi lebih baik dan kesejahteraan di suatu daerah dapat meningkat (Suryaningrum et al., 2021).

### Jumlah Objek Pariwisata

Pariwisata adalah sektor yang berpengaruh terhadap sektor lainnya dan memberikan efek yang multiplier. Jumlah objek pariwisata memberikan keuntungan bagi masyarakat dalam perekonomiannya diantaranya memberikan lapangan pekerjaan, naiknya penghasilan seseorang, maupun menjadi pembangun pertumbuhan ekonomi dalam sektor ekonominya. Pariwisata mempunyai komponen PDRB yang dapat berdampak dalam penanganan atau mengurangi kemiskinan (Anggraini & Pujiati, 2022). Sektor dalam jumlah objek pariwisata menjadi sebuah industry dengan pertumbuhan tercepat di dunia. Pariwisata berpengaruh positif dalam perekonomian yang mana sektor objek pariwisata menghasilkan investasi, merangsang devisa, serta peningkatan pendapatan (Rohmat & Indrawati, 2022). Komponen sekunder memperlihatkan efek pengeluaran terhadap penghasilan objek pariwisata yang diterima oleh sektor pariwisata, sehingga efek kemiskinan bergantung pada orang yang miskin untuk berpartisipasi untuk kegiatan terkait objek pariwisata. Efek pariwisata dalam kemiskinan memiliki hubungan terhadap efek jangka panjang kemiskinan pada pertumbuhan ekonomi, yang mengacu pada pengurangan kemiskinan di berbagai daerah (Zainuri et al., 2021).

### METODE

Analisis regresi data panel yang menggabungkan data *time series* maupun data *cross section* yang terdiri dari lima kota ataupun kabupaten di Provinsi Yogyakarta selama enam tahun, merupakan teknik analisis yang digunakan untuk memperkirakan variabel PDRB per kapita, upah minimum kabupaten/kota (UMK), indeks pembangunan manusia, dan juga jumlah objek wisata terhadap kemiskinan di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Menurut Tri Basuki & Yuliadi (2014) ekonometrika (estimator) data panel sebagai berikut :

$$TK_{it} = \beta_0 + \beta_1 PDRB_{it} + \beta_2 UMK_{it} + \beta_3 IPM_{it} + \beta_4 JOP_{it} + \epsilon_{it}$$

Di mana:

TK	=	Tingkat Kemiskinan (Persen)
PDRB	=	Produk Domestik Regional Bruto (Juta)
UMK	=	Upah Minimum Kabupaten/Kota (Rupiah)
IPM	=	Indeks Pembangunan Manusia (Persen)
JOP	=	Jumlah Obyek Pariwisata (Unit)
$\epsilon$	=	Error term (Faktor kesalahan)
i	=	Cross Section Kabupaten/Kota di Yogyakarta
$\beta_0$	=	Konstanta
$\beta_0 \dots \beta_4$	=	Koefisien regresi variabel independent
t	=	Tahun ke 2016-2021

### HASIL DAN PEMBAHASAN

#### Hasil Estimasi

Penelitian ini menggunakan metode data panel atau data gabungan antara *cross section* terdiri dari 5 kota/kabupaten di Provinsi Yogyakarta ataupun *time series* dalam kurun waktu periode 2016-2021. Hasil dari analisis data panel dengan tiga pendekatan tersebut dapat dijelaskan tabel 3. Berdasarkan hasil uji chow dan uji hausman yang dijelaskan pada tabel 3, model terbaik yang dipilih untuk mengestimasi data dalam analisis ini adalah model *Fixed Effect Model* (FEM).

**Tabel 2: Hasil Analisis Data Panel**

Variabel	Coefficient		
	CEM	FEM	REM
C	1218.815	152.7718	1218.815
logPDRB	-70.62146	1.789013	-70.62146
logUMK	-2.453998	78.15547	-2.453997
IPM	0.753223	-15.43382	0.7523223
logJOP	20.45241	1.657006	20.45241
R <sup>2</sup>	0.773713	0.992132	0.773713
Adj R <sup>2</sup>	0.737507	0.989135	0.737507
F-statistic	21.36977	331.0020	21.36977
Prob F-stat	0.000000	0.000000	0.000000

Sumber: Hasil olahan E-Views 12

### Pemilihan Model Estimasi Terpilih Uji Chow

**Tabel 3: Hasil Uji Chow**

Redundant Fixed Effects Tests (Chow test)			
Effects Tests	Statistic	d.f.	Prob.
Cross-section F	145.741020	(4,21)	0.0000
Cross-section	100.769769	4	0.0000
Chi-square			
R <sup>2</sup> = 0.773713; F-Stat = 21.36977; Sig. F-Stat = 0.000000			

Sumber: Hasil olahan E-Views 12

Model estimasi CEM atau FEM dipilih menggunakan uji Chow. Ketika nilai-p, signifikansi empiris statistik  $F > 1$ ,  $H_0$  diterima; ketika faktor-faktor ini  $< 1$ ,  $H_0$  ditolak. Nilai p, probabilitas, atau signifikansi empiris statistik F adalah 0,0000 (0,01), seperti yang dapat dilihat dari tabel di atas, dan oleh karena itu  $H_0$  ditolak. Model yang diperkirakan adalah FEM.

### Uji Hausman

**Tabel 4: Uji Hausman**

Correlated Random Effects - Hausman Test			
Test Summary	Chi-Sq. Statistic	Chi-Sq. d.f.	Prob.
Cross-section random	582.964067	4	0.0000
R <sup>2</sup> = 0.992132; F-Stat = 331.0020; Sig. F-Stat = 0.000000			

Sumber: Hasil olahan E-Views 12

Model estimasi FEM atau REM dipilih menggunakan uji Hausman. Ketika nilai-p, signifikansi empiris statistik  $\chi^2 \geq \alpha$ ,  $H_0$  diterima; jika  $\chi^2 < \alpha$ ,  $H_0$  ditolak. Terbukti dari tabel berikut bahwa  $H_0$  ditolak karena p-value, juga dikenal sebagai probabilitas  $\chi^2$  atau signifikansi statistik, adalah  $0,0000 < (0,01)$ . Model yang terpilih adalah FEM.

**Tabel 5: Hasil Regresi Uji *Fixed Effect Model* (FEM)**

$TK_{it} = 152.7718 + 1.789013 \log PDRB_{it} + 78.15547 \log UMK_{it} - 15.43382 IPM_{it}$
(0.9721)                      (0.0017)*                      (0.0286)**
$- 1.657006 \log JOP_{it}$
(0.7511)
$R^2 = 0.992132; DW = 2.014960; F. = 331.0020; Prob. F = 0.000000$
Sumber: Hasil olahan E-Views 12.

**Uji Kebaikan Model terpilih****Uji Eksistensi Model (Uji F)**

Uji statistik kebaikan menunjukkan bahwa estimasi FEM sebagai eksis, dilihat dari nilai p (p value), probabilitas, ataupun signifikansi empirik statistik F yang bernilai 0,0000 (< 0,01); jadi  $H_0$  ditolak.

**Interpretasi R-Square**

Koefisien determinasi dengan daya ramal  $R^2$  sebesar 0.992132. Secara spesifik, variabel PDRB per kapita, Upah Minimum Kabupaten/Kota, Indeks Pembangunan Manusia, dan Jumlah Objek Pariwisata dapat menjelaskan 99,21% dari kemiskinan. Sisanya dipengaruhi oleh variabel lain sebesar 0,79%.

**Uji Validalitas Pengaruh (Uji t)****Tabel 6: Hasil Uji Validalitas Pengaruh**

Variabel	T	Sig. T	Kriteria	Kesimpulan
logPDRB	0.035376	0.9721	> 0.10	Tidak Signifikan pada $\alpha = 0.10$
logUMK	3.599750	0.0017	< 0.01	Signifikan pada $\alpha = 0,01$
IPM	-2.350029	0.0286	< 0.05	Signifikan pada $\alpha = 0,05$
logJOP	0.321409	0.7511	> 0.10	Tidak signifikan pada $\alpha = 0,10$

Sumber: Hasil olahan E-views 12

Hasil menunjukkan bahwa variabel Produk Domestik Regional Bruto berkoefisien sebesar 1.789013, artinya jika variabel PDRB meningkat 1%, namun faktor variabel lain tetap, maka tingkat kemiskinan juga dapat naik sebesar 1.789013% maupun sebaliknya. Akan tetapi, nilai signifikansi t variabel Produk Domestik Regional Bruto sebesar 0.9721 > 0.10, maka PDRB tidak dapat mempengaruhi tingkat kemiskinan. Sehingga besarnya nilai koefisien PDRB tidak mempengaruhi tingkat kemiskinan. Berdasarkan hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian (Nabawi, 2020) menjelaskan PDRB tidak berpengaruh signifikan dan positif pada kemiskinan dikarenakan pertumbuhan ekonomi tidak merata pada masyarakat dan diiringi oleh bertambahnya pendatang baru sehingga berpengaruh pada usaha masyarakat tingkat kebawah, dalam artian tidak mempengaruhi kemiskinan justru akan bernilai positif dan mempengaruhi tingkat taraf kehidupan masyarakat. Meningkatkan suatu PDRB suatu daerah belum tentu dapat mengurangi tingkat kemiskinan, karena PDRB tidak dijadikan sebagai indikator kesejahteraan masyarakat dalam arti lain PDRB dihitung tanpa memperhitungkan hasil untuk nilai tambah masyarakat (Iqraam & Sudibia, 2019). Namun, menurut (Andhykha et al., 2018) jika diketahui nilai PDRB meningkat maka kemiskinan juga akan meningkat yang artinya kemiskinan dapat dipengaruhi oleh kondisi perekonomian masyarakat.

Indeks Pembangunan manusia berpengaruh negatif maupun signifikan terhadap kemiskinan di Provinsi Yogyakarta. Dilihat dari variabel IPM yang berkoefisien regresi sebesar -15.43382. Artinya semakin meningkatnya nilai IPM dapat memberikan rendahnya jumlah tingkat kemiskinan. Hasil penelitian (Fadila & Marwan, 2020) menjelaskan bahwa pengaruhnya IPM terhadap tingkat kemiskinan di Provinsi Yogyakarta dikarenakan adanya peningkatan sumber daya manusia di salah satu daerah atau berbagai daerah sehingga dapat menimbulkan pengaruh dalam kuliatas SDA yang

ada di daerah tersebut yang dapat berpengaruh pada produktivitas dari sumber daya manusianya. Selain itu dalam penelitian (Abrar et al., 2022) mengidentifikasi IPM akan membangunkan produktivitas kerja manusia yang nantinya menaikkan pendapatannya dalam mencukupi kebutuhan hidupnya sehingga, IPM memiliki pengaruh terhadap dalam lingkungan kemiskinan. Penelitian ini sesuai pada penelitian (Silaban et al., 2021) mengatakan IPM berdampak negatif maupun signifikan terhadap kemiskinan yang mana peningkatan IPM dilihat dari perubahan SDAny yang naik sehingga berdampak pada meningkatnya produktivitas kerja yang akan memberikan penghasilan yang berkecukupan, dengan adanya penghasilan yang meningkat dapat menurunkan angka kemiskinan.

Upah Minimum Kabupaten/kota di Provinsi Yogyakarta berkoefisien regresi sebesar 78.15547 sehingga dapat dijelaskan bahwa upah minimum di Provinsi Yogyakarta memiliki pengaruh terhadap kemiskinan di Provinsi Yogyakarta. Dalam Penelitian (Oktaviani & A'yun, 2021) menjelaskan bahwa kenaikan tingkat upah minimum kabupaten/kota dapat menaikkan pendapatan masyarakat contohnya di Provinsi Yogyakarta sehingga meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar dan memberikan dampak yang baik di lingkungan sekitar dengan berkurangnya jumlah penduduk yang miskin. Sesuai dengan penelitian (Islami & Anis, 2019) mengatakan upah minimum berdampak positif terhadap tingkat kemiskinan. Dapat dilihat ekonomi makro, yang mana dalam peningkatan upah minimum kabupaten/kota mengacu pada peningkatan pengangguran yang dapat dijelaskan kenaikan pengangguran dapat dihubungkan dengan kenaikan upah minimum yang dapat menimbulkan tingginya jumlah penduduk miskin yang berdampak terhadap penurunan upah minimum yang diakibatkan efek kemiskinan. Menurut Penelitian (Sutikno et al., 2019) kenaikan upah tidak selalu mengacu pada penurunan tingkat kemiskinan. Hal ini dapat disebabkan oleh fenomena yang menjelaskan peningkatan hasil upah minimum kabupaten/kota yang bercenderung dikarenakan terjadinya Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) yang menyebabkan meluasnya jumlah pengangguran. Hal ini dapat mengakibatkan meningkatnya tingkat kemiskinan penduduk.

Nilai koefisien variabel Jumlah Objek Pariwisata sebesar 1.657006, artinya apabila variabel Jumlah Objek Pariwisata naik sebesar 1%, sehingga tingkat kemiskinan juga naik sebesar 1.657006% ataupun sebaliknya. Namun, nilai signifikansi t variabel Jumlah Objek Pariwisata sebesar  $0.7511 > 0.10$ , maka menunjukkan bahwa variabel JOP tidak signifikan terhadap tingkat kemiskinan. Sehingga besarnya nilai koefisien JOP tidak mempengaruhi tingkat kemiskinan. Penelitian ini didukung oleh penelitian (Rewah et al., 2021) pada daerah ekonomi berkemajuan dan berkembangnya sektor pariwisata belum tentu dapat menanggulangi upaya tingkat kemiskinan. Menurut (Zainuri et al., 2021) objek pariwisata tidak berpengaruh terhadap kemiskinan, karena semakin banyaknya konsumsi pariwisata maka permintaan barang juga akan meningkat, sehingga membutuhkan modal bagi masyarakat miskin untuk menghasilkan barang. Penelitian ini tidak sejalan dengan (Indrawati & Rohmat, 2022) dimana terdapat beberapa objek pariwisata di suatu daerah dan mendatangkan wisatawan maka semakin tinggi konsumsi yang dikeluarkan, sehingga dapat berpengaruh pada PAD yang akan berkontribusi untuk penanggulangan kemiskinan.

## KESIMPULAN

Analisis angka kemiskinan di provinsi tersebut periode 2016-2021 menunjukkan bahwa indeks pembangunan manusia dan Upah Minimum Kabupaten/Kota memberikan dampak yang cukup besar terhadap angka kemiskinan di Provinsi Yogyakarta pada tahun 2016-2021. Seperti yang dapat diamati dari hasil uji Chow dan uji Hausman, model estimasi FEM dipilih sebagai hasil estimasi regasi unggul untuk data panel. Upah minimum kabupaten/kota dan indeks pembangunan manusia keduanya memiliki dampak pada kemiskinan pada saat yang sama, menurut Model Efek Tetap (FEM) yang dipilih, yang menjelaskan dalam model bahwa hal itu diprediksi akan berdampak. Hasil uji goodness model untuk model estimasi FEM mendukung keberadaannya.

Menurut hasil uji validitas pengaruh (t test), angka kemiskinan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta tidak berubah signifikan antara tahun 2016 dan 2021 tergantung variabel bebas produk domestik regional bruto dan jumlah obyek wisata. Dalam penelitian ini berpendapat dalam meningkatnya PDRB belum tentu berdampak terhadap kesejahteraan masyarakat. Selain itu, Jumlah



Objek Pariwisata yang banyak tidak menentukan Provinsi Yogyakarta dapat menanggulangi upaya tingkat kemiskinan.

Uji statistik kebaikan model menunjukkan model Estimasi *Fixed Effect Model* (FEM) eksis, dilihat nilai  $p$  ( $p$  value), probabilitas, ataupun signifikansi statistik empiris  $F$ , yang bernilai 0.0000 (0.01), dengan nilai  $R^2$  sebesar 0.992132. Secara spesifik, variabel PDRB per kapita, Upah Minimum Kabupaten/Kota, Indeks Pembangunan Manusia, maupun Jumlah Objek Pariwisata dapat menjelaskan 99,21% dari kemiskinan. Sisanya dipengaruhi oleh variabel lain sebesar 0,79%.

## REFERENSI

- Abrar, M., Sufirmansyah, S., Ferayanti, F., Firman, F., & Iskandar, I. (2022). Pengaruh IPM, Inflasi, Pengangguran dan Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Kemiskinan. *Jurnal Ekonomi Dan Pembangunan*, 13(1), 37–46. <https://doi.org/10.22373/jep.v13i1.761>
- Andhykha, R., Handayani, H. R., & Woyanti, N. (2018). Analisis Pengaruh PDRB, Tingkat Pengangguran, dan IPM Terhadap Tingkat kemiskinan di Provinsi Jawa Tengah. *Jurnal Media Ekonomi Dan Manajemen*, 33(2), 113–123. <https://doi.org/10.24856/mem.v33i2.671>
- Anggraini, H. Y., & Pujiati, A. (2022). The Influence of the Tourism Sector and GRDP on Poverty. *Journal of Development Economics*, 5(2), 174–181. <https://doi.org/10.15294/efficient.v5i2.51092>
- Astuti, W. (2018). Pengaruh Pertumbuhan PDRB, Tingkat Pendidikan dan Pengangguran Terhadap Kemiskinan (Study Kasus Wilayah Desa Parung Kab. Bogor). *Jurnal Ilmiah Manajemen Sumber Daya Manusia*, 1(3), 194–214. <https://doi.org/10.32493/jjsdm.v1i3.1286>
- Fadila, R., & Marwan, M. (2020). Pengaruh Indeks Pembangunan Manusia ( IPM ) dan Pertumbuhan Ekonomi terhadap Tingkat Kemiskinan di Provinsi Sumatera Barat periode tahun 2013-2018. *Jurnal Pendidikan Ekonomi*, 3(1), 120–133.
- Fitriana, R. I., & Hasmarini, M. I. (2022). Determinants of Poverty Rate in East Java Province in 2018-2020. *Journal Research of Social Science, Economic, and Management*, 02(4), 533–543. <https://doi.org/10.36418/jrssem.v2i04.307>
- Indrawati, L. R., & Rohmat, N. (2022). Pengaruh Sektor Pertanian, Industri Pengolahan, dan Pariwisata Terhadap Kemiskinan di Jawa Tengah Tahun 2016-2020. *Jurnal Jendela Inovasi Daerah*, v(1), 71–87.
- Iqraam, M., & Sudibia, I. (2019). Pengaruh PDRB, Pendidikan, Kesempatan Kerja, dan Persentase Penduduk Sektor Informal Terhadap Kemiskinan Di Provinsi Bali. *Jurnal Ekonomi Indonesia*, 8(7), 1443–1472. <https://ojs.unud.ac.id/index.php/eep/article/download/50765/30316/>
- Islami, N., & Anis, A. (2019). Pengaruh Upah Minimum Provinsi, Pendidikan, dan Kesehatan Terhadap Kemiskinan di Indonesia. *Jurnal Kajian Ekonomi Pembangunan*, 1(3), 939–948.
- Kusumaningsih, M., Setyowati, E., & Ridhwan, H. R. (2022). Study on the Impact of Economic Growth, Unemployment, and Education on South Kalimantan Province's Poverty Level from 2014 to 2020. *Proceedings of the International Conference on Economics and Business Studies (ICOEBS 2022)*, 655(Icoebs), 170–177. <https://doi.org/10.2991/aebmr.k.220602.022>
- Nabawi, H. (2020). Pengaruh Jumlah Penduduk, Tingkat Pendidikan dan PDRB terhadap Kemiskinan di Kota Malang. *Journal of Economics*, 4(2), 104–117. <https://doi.org/10.15642/oje.2020.4.2.104-117>
- Nurcholis, M. (2014). Analisis Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Upah Minimum Dan Indeks Pembangunan Manusia Terhadap Tingkat Pengangguran Di Provinsi Jawa Timur Tahun 2008-2014. *Jurnal Ekonomi Pembangunan*, 12(1), 48. <https://doi.org/10.22219/jep.v12i1.3654>
- Oktaviani, Y., & A'yun, I. Q. (2021). Analysis of the Effect of Unemployment Rate , RMW , and HDI on Poverty Rates in the Special Region of Yogyakarta. *Journal of Economics Research and Social Sciences*, 5(2), 132–138. <https://doi.org/10.18196/jerss.v5i2.11339>
- Rahmawati, O. L. N., Setyowati, E., & Faridatussalam, S. R. (2022). Analysis of Factors Affecting

- Regional Original Revenue in Yogyakarta Special Regional Province 2016-2020. *Proceedings of the International Conference on Economics and Business Studies (ICOEBS 2022)*, 655(Icoebs), 297–303. <https://doi.org/10.2991/aebmr.k.220602.039>
- Ramadhani, W. (2021). Analysis Of The Effect Of Human Development Index On Economic Growth, Poverty and Investment in Riau Province. *International Journal of Management*, 1(1), 12–15.
- Rewah, D. N., Kumenaung, A. G., & Rotinsulu, D. C. (2021). Analisis Dampak Pengembangan Sektor Pariwisata terhadap Perekonomian dan Pengentasan Kemiskinan di Provinsi Sulawesi Utara. *Jurnal Pembangunan Ekonomi Dan Keuangan Daerah*, 22(1), 100–116.
- Rohmat, N., & Indrawati, L. R. (2022). Pengaruh Sektor Pertanian, Industri Pengolahan, dan Pariwisata Terhadap Kemiskinan di Jawa Tengah Tahun 2016-2020. *Jurnal Jendela Inovasi Daerah*, 5(1), 71–87.
- Safri, M. (2021). The Analysis Related to the Factors Which Affect The Poverty Levels of District/Cities in Jambi Province During 2014-2018. *Journal of Education Management and Social Science*, 2(3), 451–462. <https://doi.org/10.31933/dijemss.v2i3>
- Silaban, P. S. M. J., Sembiring, P. S. B., Sitepu, V. A. B., & Br.Sembiring, J. P. (2021). Pengaruh IPM dan PDRB terhadap Jumlah Penduduk Miskin di Sumatera Utara Tahun 2002-2017. *Jurnal Ekonomi Dan Ekonomi Syariah*, 4(1), 311–321. <https://doi.org/10.36778/jesya.v4i1.288>
- Suryaningrum, O. A., Mulyanto, M., & Gravitiani, E. (2021). Analysis of Factors Affecting Poverty Levels: a Study of Central Java Province. *International Journal of Economics, Business and Management Research*, 5(12), 292–301.
- Sutikno, R. Y., Rotinsulu, D. C., & Tumangkeng, S. Y. L. (2019). Pengaruh Upah Minimum dan Investasi Terhadap Kemiskinan di Provinsi Sulawesi Utara. *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi*, 19(01), 88–98.
- Tri Basuki, A., & Yuliadi, I. (2014). *Electronic data processing (SPSS 15 dan EVIEWS 7)*. Danisa Media. <https://doi.org/https://doi.org/10.1080/00039896.1961.10663066>
- Wardhana, M. A., Hayati, N., Risnawati, H., & Kautsar, N. Y. (2022). The Effects of Economic Growth, Minimum Wage, Education, and Health on Poverty in Kudus, Central Java. *International Conference on Public Health*, 947–953. <https://doi.org/10.26911/icphmanagement.fp.08.2021.07>
- Zainuri, Z., Priyono, T. H., & Varazizah, A. (2021). Dampak Pariwisata Terhadap Tingkat Kemiskinan di Lima Negara ASEAN. *Jurnal Ekonomi Bisnis Dan Akuntansi*, 8(2), 138–144.